

## Tren Penelitian Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia Sebagai Kajian Ilmu Pemerintahan: Sebuah Tinjauan Analisis Bibliometrik

Muhammad Tanzil Aziz Rahimallah <sup>1\*</sup>; Ika Sartika <sup>2</sup>; Anastasia Stephanie Sumampouw <sup>3</sup>; Lolita Deby Mahendra Putri <sup>4</sup>

<sup>1</sup> Universitas Sulawesi Barat, Majene, Indonesia ; [tanzar88@gmail.com](mailto:tanzar88@gmail.com)

<sup>2</sup> Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jakarta, Indonesia

<sup>3</sup> Universitas Paramadina, Jakarta, Indonesia

<sup>4</sup> Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang, Indonesia

\*Correspondence : [tanzar88@gmail.com](mailto:tanzar88@gmail.com)

### ABSTRAK

Penelitian ini pada dasarnya dilakukan untuk mengetahui dan memberikan gambaran terkait perkembangan bidang kajian informasi publik sebagai salah satu bidang kajian ilmu pemerintahan dalam rentang waktu 15 tahun terakhir. Metode penelitian yang digunakan adalah tinjauan pustaka sistematis dengan menggunakan analisis bibliometrik. Analisis bibliometrik dilakukan menggunakan aplikasi Publish or Perish dan Vos Viewer dengan menganalisa 540 penelitian yang terbagi menjadi 4 kluster dan 47 topik. Hasil penelitian menunjukkan Walaupun data yang dikumpulkan berasal dari hasil penelitian sejak tahun 2008 sampai 2022 namun penelitian terkait keterbukaan informasi publik justru sangat intens dilakukan pada rentang tahun 2016 sampai 2019. Topik-topik yang dimunculkan pada dasarnya cenderung monoton artinya bisa ditafsirkan bahwa perkembangan kajian terkait keterbukaan informasi publik cenderung berputar pada topik-topik umum saja. Rekomendasi kepada peneliti selanjutnya yang ingin meneliti bidang kajian keterbukaan informasi publik bisa coba mengulas beberapa topik yang menarik dan masih jarang diteliti misalnya hubungan keterbukaan informasi publik dengan topik korupsi, Good Corporate Governance (GCG), pemilu dan e-procurement.

### ABSTRACT

This research was basically conducted to find out and provide an overview related to the development of the field of public information studies as a field of study of government science in the last 15 years. The research method used in this research is a systematic literature review using bibliometric analysis. Bibliometric analysis used the Publish or Perish and Vos Viewer applications by analyzing 540 studies divided into 4 clusters and 47 topics. The results of the study show that although the data collected comes from research results from 2008 to 2022, research related to "public information disclosure" has been very intensely carried out in the range of 2016 to 2019. The topics that are raised basically tend to be monotonous, so it can be interpreted that the development of studies on "public information disclosure" tends to revolve around general topics only. Recommendations for future researchers who will conduct research in the field of "public information disclosure", they can try to review some interesting topics and topics that are rarely researched. For example, the relationship between public information disclosure with the theme of corruption, Good Corporate Governance (GCG), elections and e-procurement.

### Kata kunci

*analisis bibliometrik,  
keterbukaan informasi  
publik, ilmu pemerintahan,  
informasi publik*

### Keywords

*bibliometric analysis,  
government science, public  
information, public  
information disclosure.*

## Pendahuluan

Dalam pengertian umum informasi diartikan sebagai pada ketersediaan beraneka ragam bahan berupa pengetahuan atau sesuatu yang dianggap sebagai bahan untuk melakukan komunikasi. Sebagai bahan pengetahuan, informasi terdapat dalam berbagai bentuk dan penampilan baik yang sifatnya tersedia/disajikan maupun yang ditutupi atau tidak untuk disajikan (Publikasi). Sebagai bahan komunikasi, informasi merupakan bahan yang dipertukarkan dan menjadi penghubung antara dua pihak atau lebih baik yang bertindak sebagai subjek maupun objek komunikasi (Dimpleby & Burton, 2020; Grunig & Grunig, 2013; Kang, Kim, & Seong-Min, 2019)

Hak atas informasi adalah bagian yang sangat menentukan dalam kehidupan setiap manusia terutama sebagai dasar untuk berpartisipasi dalam semua proses-proses sosial. Hal tersebut membuat setiap orang harus memperoleh haknya untuk mendapat akses informasi dalam berbagai aspek kehidupan. Karena itu keterbukaan informasi yang dilaksanakan dan diselenggarakan di sebuah negara harus mengandung tiga unsur utama yaitu transparansi, efisiensi, dan partisipasi (Sumarto, 2003). Dengan terpenuhinya hak setiap warga negara dalam mendapatkan informasi maka secara tidak langsung akan mendorong dan meningkatkan ketahanan nasional negara kita. Keterbukaan informasi menjadi salah satu ciri penting yang harus dijamin oleh negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyatnya guna mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Sehingga Bagaimanapun juga hak untuk tahu menjadi hak dasar dan utama yang melekat pada seluruh warga Negara Indonesia.

Dalam era berkembangnya teknologi informasi maka pemerintah juga dituntut untuk membuka seluas-luasnya informasi khususnya informasi yang bersifat umum dan mendasar. Bahkan salah satu indikator utama terciptanya *smart city* yang menjadi tujuan kota-kota di dunia saat ini adalah keterbukaan informasi kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa ikut berpartisipasi dan bersama-sama dengan pemerintah dalam menentukan keputusan yang lebih baik (*smart decision-making*) (Meijer, 2016).

Informasi publik merupakan salah satu kajian dalam ilmu pemerintahan dan juga ilmu administrasi publik/negara. Pada ilmu pemerintahan sendiri, kajian terkait informasi publik ini masuk dalam bidang kajian komunikasi pemerintahan yang dimana, negara melalui birokrat/pemerintahnya berbagi informasi, gagasan atau perasaan, dan sikap dengan partisipan komunikasi lainnya yang disebut komunikan, yaitu aparatur pemerintah untuk internal organisasi dan dunia usaha, masyarakat dan organisasi-organisasi non-pemerintah untuk eksternal organisasi, dan sebaliknya (Silalahi, 2004)

Keterbukaan informasi publik bisa diartikan sebagai kesediaan badan publik negara atau badan publik non negara untuk memberikan berbagai informasi faktual mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan pembuatan kebijakan,

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, sosial, hukum dan aspek-aspek lainnya yang berkaitan dengan kepentingan publik (Mustofa, 2020). Dalam banyak literatur telah disimpulkan bahwa dengan melaksanakan keterbukaan informasi maka akan mendukung tingkat kesuksesan badan publik termasuk dalam hal ini pemerintah dan lembaga-lembaganya untuk lebih bisa memaksimalkan tujuannya.

Keterbukaan informasi akan mampu meningkatkan akurasi, efisiensi dan efektifitas kebijakan yang diambil oleh badan publik karena terjadinya interaksi atas pertukaran informasi yang dilakukan (Yang & Maxwell, 2011). Namun hal yang paling utama dalam mendorong keterbukaan informasi adalah dukungan dari lembaga-lembaga politik (legislatif) dalam menyiapkan peraturan dan dasar hukum agar keterbukaan informasi dapat dilakukan secara luas dan menyeluruh pada lembaga-lembaga pemerintahan. Hukum dan landasan peraturan perundang-undangan dalam menjamin keterbukaan informasi akan mampu membangun relasi, pengurangan resiko dan saling percaya antar organisasi pemerintah (publik) dalam upaya saling membuka dan berbagi informasi (Criado, Sandoval-Almazan, & Gil-Garcia, 2013; Gil-Garcia & Martinez-Moyano, 2007; Otjacques, 2007; Perri, Bellamy, Raab, Warren, & Heeney, 2008)

Di Indonesia jaminan terkait keterbukaan informasi telah diatur keberadaannya dalam peraturan perundang-undangan yakni pada UUD 1945 hasil amandemen pasal 28F dan 28J yang kemudian diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi tersebut dengan jelas diamanahkan bahwa tidak lagi ada alasan bagi badan publik untuk menutupi atau menyembunyikan informasi yang bersifat umum dan berdampak luas bagi masyarakat banyak, terkecuali untuk info yang bersifat dikecualikan. Badan publik harus secara berkala, tahunan atau serta merta dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Disisi lain masyarakat juga dituntut dalam memanfaatkan setiap informasi yang diperoleh secara baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam upaya penyelenggaraan keterbukaan informasi kepada publik di Indonesia, dibentuk suatu badan yang bertugas menjaga dan mengawasi penyelenggaraan keterbukaan informasi publik yaitu Komisi Informasi Publik (KIP) baik yang berkedudukan di Pusat maupun di Daerah. Sejak tahun 2008 sampai tahun ini sudah terbentuk KIP baik ditingkat pusat maupun di seluruh provinsi (kecuali 3 provinsi baru yaitu Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Selatan), sedangkan untuk tingkat Kabupaten/Kota pembentukannya belum merata dan masih dalam proses pembentukan.

Komisi Informasi Publik dalam komitmennya mendorong keterbukaan informasi telah melaksanakan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi sejak tahun 2011. Monev terakhir dilakukan oleh KIP adalah pada tahun 2021 kepada 337 badan publik dengan indikator penilaian yaitu indikator pengembangan website dan digitalisasi total, pengumuman informasi publik, pelayanan informasi publik, dan

penyediaan informasi publik. Hasil monitoring evaluasi dilakukan dengan menggolongkan badan-badan publik tersebut ke dalam kategori Badan Publik tidak informatif, kurang informatif, cukup informatif, menuju informatif dan informatif (Komisi Informasi Publik Republik Indonesia, 2021).

Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan perkembangan kajian dan penelitian terkait informasi publik khususnya di Indonesia menjadi semakin pesat pula. Penelitian ini pada dasarnya dilakukan untuk mengetahui dan memberikan gambaran terkait perkembangan bidang penelitian dengan tema kajian informasi publik yang sudah dilakukan di Indonesia dalam rentang waktu 15 tahun terakhir (2008-2022) atau sejak disahkannya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Pada dasarnya penelitian menggunakan analisis bibliometrik belum banyak dilakukan di Indonesia terlebih untuk memetakan tren berkaitan dengan keterbukaan informasi publik bisa dikatakan belum ada sama sekali. Oleh karena itu penelitian ini menjadi jembatan yang mengisi kekosongan/gap tersebut. Melalui penelitian ini maka penelitian-penelitian terkait informasi publik akan dianalisa menggunakan analisis bibliometrik sehingga bisa dipetakan hubungan antara penelitian-penelitian sejenis dan yang paling penting fokus kajian dalam bidang informasi publik yang telah banyak dan yang masih minim diteliti sehingga bisa menjadi rekomendasi pemetaan kajian dan novelty terkait penelitian informasi publik untuk peneliti-peneliti yang akan datang.

## Metode

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis bibliometrik pada literatur yang meneliti kajian terkait informasi publik. Studi bibliografi sebagai salah satu model analisa literatur yang baru dikembangkan dan digunakan untuk mengkaji literatur teoritis di berbagai bidang pengetahuan, termasuk ilmu sosial dan teori-teori yang terkait dengan studi tersebut atau lebih dikenal dengan istilah analisis bibliometrik (Matandirotya, 2021). Menurut Lotka dalam Coile analisis bibliometrik adalah metode untuk mengukur produktivitas peneliti (Coile, 1977). Oleh Bradford analisis bibliometrik didefinisikan sebagai hukum untuk membedah pengetahuan ilmiah (Bradford, 1976). Zipf menyatakannya analisis bibliometrik digunakan sebagai template untuk distribusi kata dan frekuensi dalam teks (Zipf, 1949)

Fonseca mendefinisikan analisis bibliometrik sebagai metode kuantitatif dan statistik untuk mengukur tingkat produksi ilmiah dan cara untuk menyebarkan pengetahuan ilmiah (Fonseca, 2013). Pendekatan bibliometrik digunakan untuk mengidentifikasi tren dan perkembangan di setiap bidang keilmuan (Ahmad, Murad, Baig, & Hui, 2021; Liao et al., 2018; Mattos, Perazzo, & ..., 2021; Palmas, Mais, Mascia, & Vacca, 2021). Dari berbagai definisi tersebut maka dapat kita simpulkan bahwa analisis bibliometrik adalah suatu studi kuantitatif terhadap data bibliografi sehingga dapat ditarik suatu visualisasi tentang kajian dalam suatu bidang penelitian

berdasarkan metadata dari penelitian tersebut yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi tren dan perkembangan suatu kajian pada bidang ilmu tertentu.

Metode bibliometrik (*co-citation analysis, bibliographic coupling*) menggunakan data bibliografi dari database publikasi untuk membangun gambaran struktural dari bidang keilmuan. Metode bibliometrik memiliki dua kegunaan utama: analisis kinerja dan pemetaan sains (Cobo, 2011). Metode bibliometrik memperkenalkan ketelitian metode kuantitatif ke dalam evaluasi subjektif literatur dan mampu memberikan bukti kategori yang diturunkan secara teoritis dalam mengulas sebuah artikel.

Ada lima metode bibliometrik, tiga metode utama yang menggunakan data kutipan untuk memetakan penelitian berdasarkan pada tingkat pengaruh dan kesamaan penelitian yaitu *citation analysis, co-citation analysis, dan bibliographical coupling*. Kemudian dua metode lainnya yaitu *co-author analysis* dan *co-word analysis*. *Citation analysis* dapat memberikan informasi tentang pengaruh relatif publikasi, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi jaringan interkoneksi di antara para peneliti (Üsdiken, 1995). *Co-citation Analysis* (McCain, 1990) menggunakan jumlah *co-citation* untuk membangun ukuran kesamaan antara unsur dokumen, penulis, atau jurnal. *Co-citation* didefinisikan sebagai frekuensi di mana dua unsur dikutip bersama-sama (Small, 1973). *Bibliographical coupling* menggunakan jumlah referensi yang dibagikan oleh dua dokumen sebagai ukuran kesamaan di antara keduanya. Semakin banyak bibliografi dari dua artikel yang tumpang tindih, semakin kuat hubungannya. *Bibliographical coupling* paling baik dilakukan dalam jangka waktu terbatas (Glänzel & Thijs, 2012).

*Co-author analysis* meneliti jejaring sosial yang dibuat ilmuwan dengan berkolaborasi dalam artikel ilmiah (Acedo, Barroso, Casanueva, & ..., 2006). Hubungan antara dua penulis terjalin ketika mereka menerbitkan makalah bersama (Lu & Wolfram, 2012). Adapun *co-word analysis* (Callon, Courtial, Turner, & ..., 1983) adalah teknik analisis konten yang menggunakan kata-kata dalam dokumen untuk membangun hubungan dan membangun domain struktur konseptual. *Co-word analysis* dapat diterapkan pada judul dokumen, kata kunci, abstrak, atau teks lengkap. Unit analisisnya adalah konsep, bukan dokumen, penulis, atau jurnal. Kualitas hasil dari *co-word analysis* bergantung pada berbagai faktor yaitu kualitas kata kunci, cakupan database, dan kecanggihan metode statistik yang digunakan untuk analisis (He, 1999).

Prosedur analisis bibliometrik dilakukan dengan mengikuti tiga prosedur yaitu: 1). Kompilasi data; 2). Penataan dan pembersihan data 3). analisis, interpretasi, dan visualisasi (Briones-Bitar, 2020). Untuk memilih artikel yang relevan, penelitian ini mengembangkan pencarian literatur yang bersumber dari pencarian pada google scholar dan difokuskan pada jurnal-jurnal berbahasa Indonesia (nasional) terakreditasi sinta. Google Scholar adalah sumber alternatif statistik kutipan yang berharga, khususnya dalam ilmu informasi dan sosial (Harzing & Wal, 2009). Google

Scholar memiliki beberapa fitur-fitur penting yang dapat membantu dalam melakukan proses pencarian publikasi hasil penelitian sehingga data yang dikumpulkan lebih sistematis dan relevan dengan kajian yang hendak kita pelajari yaitu: opsi pencarian lanjutan, peringkat relevansi, akses teks lengkap, akses kelembagaan, perpustakaan dan pencarian web (Mayr & Walter, 2007). Proses pencarian literatur ini menggunakan aplikasi Harzing's Publish or Perish yang diakses pada tanggal 14 November 2022.

Data dari hasil pencarian menggunakan Publish or Perish (format .ris) selanjutnya diekspor ke Vos Viewer 1.6.18 ([www.vosviewer.com](http://www.vosviewer.com)) untuk dianalisa dan divisualisasikan bibliometriknya. Program VOS adalah teknik pemetaan dimana VOS berarti visualisasi kesamaan (N. Van Eck & Waltman, 2010; Guleria & Kaur, 2021; Orduña-Malea & Costas, 2021; Shah, Lei, Ali, Doronin, & Hussain, 2019). VOS Viewer merupakan alat analisa yang berguna untuk melacak dan memetakan perkembangan kajian keilmuan di berbagai bidang khususnya pada penelitian yang telah dipublikasikan secara digital (memiliki meta-data)

**Gambar 1.** Proses penelitian mulai dari pengumpulan data, analisa dan penarikan kesimpulan



### Kompilasi data

Proses pengumpulan data dimulai dari melakukan pencarian menggunakan aplikasi Harzing's Publish or Perish (PoP). Penggunaan PoP dipilih karena selain memudahkan proses pencarian, aplikasi PoP juga membantu untuk memfokuskan pencarian berdasarkan kata kunci pencarian, rentang waktu, penulis, dan judul publikasi/penelitian. Dengan menggunakan PoP juga kita bisa mengetahui peringkat suatu publikasi penelitian berdasarkan jumlah sitasi penelitian tersebut. Pada dasarnya dengan menggunakan PoP kita bisa menentukan fokus pencarian pada

situs-situs umum yang digunakan untuk publikasi hasil penelitian khususnya jurnal baik itu google scholar, scopus, crossref, openalex, pubmed, semantic scholar, ataupun web of science. Namun penelitian ini memfokuskan pencarian pada publikasi pada google scholar dengan pertimbangan terbatasnya jumlah penelitian terkait informasi publik di Indonesia pada situs pencarian selain google scholar.

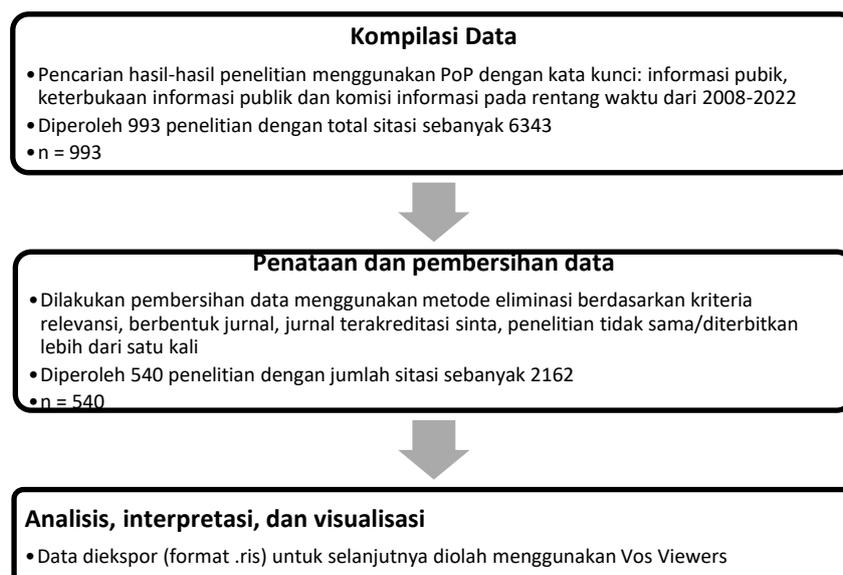
Dengan menggunakan PoP, dimasukkan kata kunci yaitu: “**informasi publik, keterbukaan informasi publik dan komisi informasi**” pada rentang waktu dari 2008-2022. Selanjutnya diperoleh 993 paper dengan total sitasi sebanyak 6343. Data literatur tersebut Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada gambar 2.

### Penataan dan Pembersihan Data

Dari sebanyak 993 penelitian yang telah dikompilasikan maka selanjutnya dilakukan penataan dan pembersihan data. Prosedur ini dilakukan dengan mengeliminasi penelitian-penelitian yang tidak relevan. Adapun kriteria penelitian yang dieliminasi adalah: 1). penelitian yang substansi kajiannya jauh dari relevansi kajian terkait informasi publik; 2). penelitian yang tidak berbentuk jurnal seperti buku dan artikel; 3). penelitian yang diterbitkan dalam jurnal namun tidak terakreditasi sinta; 4). penelitian yang sama (biasanya diterbitkan dari penerbit yang berbeda atau penelitian tersebut dipublikasi ulang melalui situs berbeda seperti pada academia.edu, researchgate.net, osf.io dan sejenisnya).

Setelah melakukan proses penataan dan pembersihan data maka hanya tersisa sebanyak 540 penelitian dengan jumlah sitasi sebanyak 2162. Data tersebut selanjutnya dieskpor (format .ris) untuk selanjutnya diolah menggunakan Vos Viewers.

**Gambar 2.** Prosedur Analisis Bibliometrik sesuai dengan prosedur (Briones-Bitar, 2020) pada Google Scholar dalam Publish or Persih



## Analisis, Interpretasi, dan Visualisasi

Analisa terhadap 540 penelitian yang membahas tentang keterbukaan informasi publik di Indonesia dilakukan dengan mencari kesamaan/pengulangan term (kata/frasa) yang muncul dari 540 penelitian tersebut. Dengan menggunakan aplikasi Vos Viewer peneliti membatasi tingkat pengulangan kata paling kurang 5 kali untuk menentukan bidang kajian yang kemungkinan difokuskan dari 540 penelitian tersebut. Adapun ranah pencarian kata dilakukan pada judul penelitian dan abstraksi yang dicantumkan dalam penelitian tersebut

Hasilnya dari 5349 kata/frasa yang muncul terdapat 87 kata/frasa yang dianggap berkaitan/saling terhubung dan mengalami pengulangan minimal 5 kali. Dari 87 kata/frasa tersebut dilakukan seleksi lagi untuk menentukan kata-kata yang relevan dengan kajian keterbukaan informasi publik. Pada dasarnya aplikasi Vos Viewer memiliki proses otomatis untuk melakukan hal ini namun pada penelitian ini proses seleksi kata yang relevan dilakukan secara manual sehingga hasilnya lebih kuat relevansinya

## Hasil dan Pembahasan

Setelah dilakukan proses seleksi dan relevansi kata/frasa yang dianggap sebagai fokus kajian maka diperoleh 47 topik yang terbagi menjadi 4 kluster pada 337 penelitian dari total 540 sampel penelitian bisa dilihat pada gambar 8. 47 topik inilah yang dianggap sebagai fokus kajian yang akan memandu kita dalam melakukan analisis terhadap penelitian keterbukaan informasi publik di Indonesia. Analisis yang dilakukan terdiri dari hubungan antar kluster, kebaruan (berdasarkan tahun) dan kejenuhan fokus kajian.

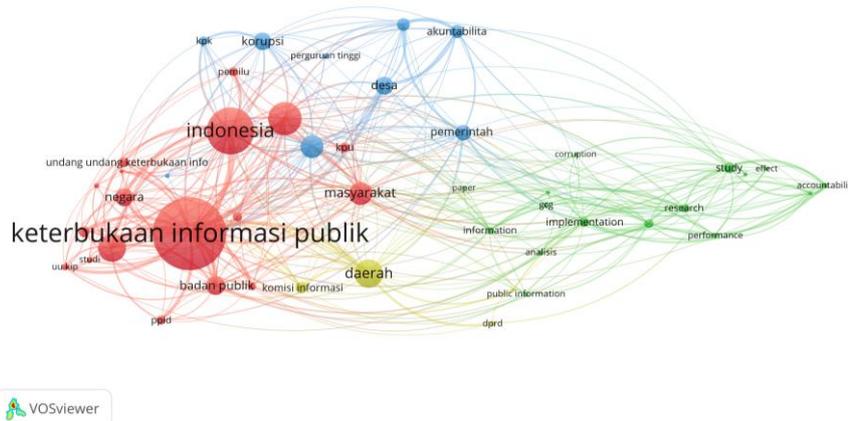
**Gambar 3.** Hasil analisa kluster berdasarkan kata/frasa yang mengalami minimal lima kali pengulangan

<b>Kluster 1 (18 topik)</b> Badan publik, hak, HAM, Indonesia, informasi publik, keterbukaan informasi, keterbukaan informasi publik, KIP, komisi, komisi informasi pusat, KPU, masyarakat, negara, pemilu, PPID, studi, UU keterbukaan informasi publik, UU kip	<b>Kluster 2 (16 topik)</b> Accountability, analisis, corruption, E-procurement, effect, GCG (Good Corporate Governance, fraud, implementation, influence, information, paper, performance, public information, research, study, transparency	<b>Kluster 3 (9 topik)</b> Akuntabilitas, desa, korupsi, KPK, pelayanan publik, pemerintah, perguruan tinggi, studi kasus, transparansi
		<b>Kluster 4 (4 topik)</b> APBD, daerah, DPRD, Komisi Informasi

Sumber : Hasil analisis VosViewer (2022)

Adapun pola hubungan antar kluster dan topik dapat dilihat menggunakan visualisasi jaringan (*Network Visualization*) seperti pada gambar 4

**Gambar 4.** Hubungan antar kluster dan topik sebagai bentuk perkembangan penelitian pada kajian keterbukaan informasi publik



Sumber : Hasil analisis VosViewer (2022)

Gambar 4 mengilustrasikan visualisasi jaringan yang berisi item selanjutnya kita anggap sebagai topik kajian. Item yang disebut juga node atau simpul merupakan objek atau topik kajian yang diminati (N. J. Van Eck & Waltman, 2019). Simpul-simpul yang memiliki garis jaring ini merupakan gambaran kondisi/kejadian yang ada pada judul dan abstrak artikel, artinya semakin besar kejadiannya maka semakin besar pula ukuran simpulnya. Antara satu simpul dengan simpul lainnya dapat terdapat garis jaring yang merupakan relasi atau koneksi antara dua atau lebih simpul. Pola hubungan ini memiliki kekuatan yang ditandai dengan angka yang berarti semakin besar angka yang dimiliki maka semakin kuat polanya. Berdasarkan gambar 9 tersebut terdapat 47 simpul/node yang terbagi menjadi 4 kluster, yang totalnya mencakup 337 link dan total 540 kekuatan link. Visualisasi jaringan terbentuk dari kata kunci “informasi publik, keterbukaan informasi publik, komisi informasi” pada pencarian yang dilakukan pada google scholar menggunakan Publish or Persih.

Kata kunci yang tertera pada judul dan abstrak artikel penelitian ini membuat grafik yang terdiri dari banyak kluster yang masing-masing diwakili oleh warna tertentu. Oleh karena itu, jumlah warna pada visualisasi tersebut menunjukkan jumlah cluster dalam jaringan dan topik/node yang memiliki kesamaan warna menggambarkan bahwa topik tersebut berada pada kluster yang sama. Kluster 1 berwarna merah, kluster 2 berwarna hijau, kluster 3 berwarna biru dan kluster terakhir berwarna kuning dimana masing-masing kluster terdapat fokus kajian/topik sebagaimana telah diuraikan pada gambar 8.

Pada gambar 9 diketahui bahwa kluster 1 (warna merah) merupakan kluster dengan topik yang paling besar (paling banyak diteliti) sehingga semakin banyak pula terkoneksi dengan topik-topik penelitian pada kluster yang lain. Sedangkan kluster 4 (warna kuning) menjadi kluster dengan topik yang paling kecil relasinya dengan topik-topik lain.



**Gambar 6.** Tingkat kejenuhan penelitian keterbukaan informasi publik berdasarkan topik (kiri) dan berdasarkan kluster (kanan)



Sumber : Hasil Analisis VOSViewer (2022)

Bagian ini merupakan bagian yang sangat berguna untuk mengetahui gambaran dari pola perkembangan penelitian dengan memperhatikan bagian item/topik yang dianggap penting untuk dianalisis. Melalui visualisasi ini, kita dapat menafsirkan kata kunci (dalam hal ini terkait keterbukaan informasi publik) dan topik yang paling sering digunakan dalam suatu publikasi. Dari gambar 11 bisa kita simpulkan beberapa topik yang menarik dan masih jarang dilakukan penelitian terkait keterbukaan informasi publik adalah topik korupsi/corruption, Good Corporate Governance (GCG), pemilu dan e-procurement.

### Kesimpulan

Hasil penelitian terkait tren penelitian pada bidang kajian keterbukaan informasi publik sebagai salah satu kajian pada bidang ilmu pemerintahan setelah dianalisa menggunakan analisis bibliometrik dengan menggunakan aplikasi Publish or Perish dan Vos Viewer maka dari 993 penelitian berdasarkan pencarian di Google Scholar, terseleksi 540 penelitian yang terbagi menjadi 4 kluster dan 47 topik. Walaupun data yang dikumpulkan berasal dari hasil penelitian sejak tahun 2008 sampai 2022 namun penelitian terkait keterbukaan informasi publik justru sangat intens dilakukan pada rentang tahun 2016 sampai 2019. Topik-topik yang dimunculkan pada dasarnya cenderung monoton artinya bisa ditafsirkan bahwa perkembangan kajian terkait keterbukaan informasi publik cenderung berputar pada topik-topik umum saja. Topik umum yang dimaksud hanya berkaitan dengan implementasi undang-undang, konsep dan teori, peran dan fungsi keterbukaan informasi publik dan tidak meluas pada topik-topik lain. Rekomendasi kepada peneliti selanjutnya yang ingin meneliti bidang kajian keterbukaan informasi publik bisa coba mengulas beberapa topik yang menarik dan masih jarang diteliti misalnya hubungan keterbukaan informasi publik dengan topik korupsi/corruption, Good Corporate Governance (GCG), pemilu dan e-procurement.

### Referensi

Acedo, F. J., Barroso, C., Casanueva, C., & ... (2006). Co-authorship in management and organizational studies: An empirical and network analysis. *Journal of*

- Management Studies*. <https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.2006.00625.x>
- Ahmad, T., Murad, M. A., Baig, M., & Hui, J. (2021). Research trends in COVID-19 vaccine: a bibliometric analysis. *Human Vaccines & ...* <https://doi.org/10.1080/21645515.2021.1886806>
- Bradford, S. (1976). Classic paper in the management of library collections sources of information on specific subjects. *Collection Management*, 1(3), 95–103. [https://doi.org/10.1300/J105v01n03\\_06](https://doi.org/10.1300/J105v01n03_06)
- Briones-Bitar, J. (2020). Rockfall research: A bibliometric analysis and future trends. *Geosciences (Switzerland)*, 10(10), 1–25. <https://doi.org/10.3390/geosciences10100403>
- Callon, M., Courtial, J. P., Turner, W. A., & ... (1983). From translations to problematic networks: An introduction to co-word analysis. *Social Science ...* <https://doi.org/10.1177/053901883022002003>
- Cobo, M. (2011). Science mapping software tools: Review, analysis, and cooperative study among tools. *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, 62(7), 1382–1402. <https://doi.org/10.1002/asi.21525>
- Coile, R. (1977). Lotka's frequency distribution of scientific productivity. *Journal of the American Society for Information Science*, 28(6), 366–370. <https://doi.org/10.1002/asi.4630280610>
- Criado, J. I., Sandoval-Almazan, R., & Gil-Garcia, J. R. (2013). Government innovation through social media. *Government Information Quarterly*, 30(4), 319–326. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2013.10.003>
- Dimbleby, R., & Burton, G. (2020). *More than words: An introduction to communication*. taylorfrancis.com. <https://doi.org/10.4324/9781003060284>
- Eck, N. J. Van, & Waltman, L. (2019). *Manual for VOSviewer version 1.6*. 10. CWTS Meaningful metrics. Universiteit Leiden.
- Eck, N. Van, & Waltman, L. (2010). Software survey: VOSviewer, a computer program for bibliometric mapping. *Scientometrics*.
- Fonseca, E. N. (2013). Bibliometria: teoria e prática. *Bibliometria: Teoria e Prática*. pesquisa.bvsalud.org.
- Gil-Garcia, J. R., & Martinez-Moyano, I. J. (2007). Understanding the evolution of e-government: The influence of systems of rules on public sector dynamics. *Government Information Quarterly*.
- Glänzel, W., & Thijs, B. (2012). Using “core documents” for detecting and labelling new emerging topics. *Scientometrics*.
- Grunig, J. E., & Grunig, L. A. (2013). Models of public relations and communication. ... in *Public Relations and Communication ...*
- Guleria, D., & Kaur, G. (2021). Bibliometric analysis of ecopreneurship using VOSviewer and RStudio Bibliometrix, 1989–2019. *Library Hi Tech*. <https://doi.org/10.1108/LHT-09-2020-0218>
- Harzing, A. W., & Wal, R. Van der. (2009). A Google Scholar h-index for journals: An

- alternative metric to measure journal impact in economics and business. ... *of the American Society for ...* <https://doi.org/10.1002/asi.20953>
- He, Q. (1999). *Knowledge discovery through co-word analysis*. Graduate School of Library Information Science.
- Kang, H., Kim, K., & Seong-Min, J. E. (2019). Method and device for communication. *US Patent 10,228,903*.
- Komisi Informasi Publik Republik Indonesia. (2021). *Transformasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia*. Jakarta: Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia.
- Liao, H., Tang, M., Luo, L., Li, C., Chiclana, F., & Zeng, X. J. (2018). A bibliometric analysis and visualization of medical big data research. *Sustainability*.
- Lu, K., & Wolfram, D. (2012). Measuring author research relatedness: A comparison of word-based, topic-based, and author cocitation approaches. *Journal of the American Society for ...* <https://doi.org/10.1002/asi.22628>
- Matandirotya, N. R. (2021). Research trends in the field of ambient air quality monitoring and management in South Africa: A bibliometric review. *Environmental Challenges*. Elsevier.
- Mattos, F. F., Perazzo, M. F., & ... (2021). Top 100 most-cited papers in core dental public health journals: bibliometric analysis. ... *Dentistry and Oral ...* <https://doi.org/10.1111/cdoe.12572>
- Mayr, P., & Walter, A. K. (2007). An exploratory study of Google Scholar. *Online Information Review*. <https://doi.org/10.1108/14684520710841784>
- McCain, K. W. (1990). Mapping authors in intellectual space: A technical overview. *Journal of the American Society for Information ...*
- Meijer, A. (2016). Governing the smart city: a review of the literature on smart urban governance. *International Review of Administrative Sciences*, 82(2), 392–408. <https://doi.org/10.1177/0020852314564308>
- Mustofa, S. (2020). *Hukum Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia*. books.google.com.
- Orduña-Malea, E., & Costas, R. (2021). Link-based approach to study scientific software usage: The case of VOSviewer. *Scientometrics*. Springer. <https://doi.org/10.1007/s11192-021-04082-y>
- Otjacques, B. (2007). Interoperability of E-government information systems: Issues of identification and data sharing. *Journal of Management Information Systems*, 23(4), 29–51. <https://doi.org/10.2753/MIS0742-1222230403>
- Palmas, S., Mais, L., Mascia, M., & Vacca, A. (2021). Trend in using TiO<sub>2</sub> nanotubes as photoelectrodes in PEC processes for wastewater treatment. *Current Opinion in Electrochemistry*.
- Perri, Bellamy, C., Raab, C., Warren, A., & Heeney, C. (2008). Institutional shaping of interagency working: Managing tensions between collaborative working and client confidentiality. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 17(3), 405–434. <https://doi.org/10.1093/jopart/mul018>

- Shah, S. H. H., Lei, S., Ali, M., Doronin, D., & Hussain, S. T. (2019). Prosumption: bibliometric analysis using HistCite and VOSviewer. *Kybernetes*. <https://doi.org/10.1108/K-12-2018-0696>
- Silalahi, U. (2004). Komunikasi Pemerintahan: Mengirim Danmenerima Informasi Tugas Dan Informasi Publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(1), 36–54.
- Small, H. (1973). Co-citation in the scientific literature: A new measure of the relationship between two documents. *Journal of the American Society for Information ...* <https://doi.org/10.1002/asi.4630240406>
- Sumarto, H. S. (2003). *Inovasi Partisipasi Dan Good Governance, 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia.
- Üsdiken, B. (1995). Organizational Analysis in North America and Europe: A Comparison of Co-citation Networks. *Organization Studies*, 16(3), 503–526. <https://doi.org/10.1177/017084069501600306>
- Yang, T. M., & Maxwell, T. A. (2011). Information-sharing in public organizations: A literature review of interpersonal, intra-organizational and inter-organizational success factors. *Government Information Quarterly*.
- Zipf, G. K. (1949). Human Behaviour and the Principle of Minimum Effort. *Cambridge, Massachusetts, Addison*.